
**PERAN TOLO DALAM PEMBENTUKAN GEREJA MASEHI INJILI DI
HALMAHERA (GMIH)**

Jemi Sengo¹, Hetreda Terry², Aksilas Dasfordate³, Almen Sulpendi Ramaino⁴

Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNIMA

E-mail: jemiarjuniussengo@gmail.com, hetredaterry@unima.ac.id,
aksilasdastfordate@unima.ac.id, almenramaino@unima.ac.id

Article History

Received : 2021-06-08 Accepted : 2021-06-15 Published : 2021-06-30

Abstrak-Permasalahan dalam penelitian ini adalah pentingnya peranan dalam menciptakan sebuah organisasi yang baik dan mandiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya adalah sikap yang kurang baik yang tidak mau bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kehidupan gerejawi masyarakat Halmahera sebelum berdirinya GMIH dan menjelaskan dan menganalisis peran Tolo dalam pembentukan GMIH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Mengumpulkan, menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman, peninggalan-peninggalan masa lampau serta usaha untuk melakukan sintesa dari data-data masa lampau tersebut menjadi kajian yang dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tolo dalam pembentukan GMIH adalah peran yang sangat penting juga dibantu beberapa teman-temannya juga para pemimpin suku yang memiliki semangat yang sama untuk menciptakan sebuah gereja yang mandiri atau berdiri sendiri. Berkat semangat dan pantang menyerah, terbentuklah sebuah gereja yang mandiri yang kini disebut GMIH yang resminya di bentuk pada tanggal 6 Juni 1949.

Kata kunci: *Peran Tolo, Pembentukan GMIH.*

**TOLO'S ROLE IN THE ESTABLISHMENT OF THE GOSPEL CHURCH IN
HALMAHERA (GMIH)**

Jemi Sengo¹, Hetreda Terry², Aksilas Dasfordate³, Almen Sulpendi Ramaino⁴

Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNIMA

E-mail: jemiarjuniussengo@gmail.com, hetredaterry@unima.ac.id,
aksilasdastfordate@unima.ac.id, almenramaino@unima.ac.id

Abstract-The problem in this research is the importance of the role in creating a good and independent organization. Factors that can influence it are unfavorable attitudes that do not want to work together to achieve common goals. The purpose of this study is to describe the ecclesiastical life of the Halmahera community before the establishment of GMIH and to explain and analyze Tolo's role in the formation of GMIH. The method used in this research is the historical research method. Collecting, testing and critically analyzing records, relics of the past as well as efforts to synthesize these past data into a reliable study. some of his friends are also tribal leaders who share the same passion for creating an independent or self-sustaining church. Thanks to passion and unyielding, an independent church was formed which is now called GMIH which was officially formed on June 6, 1949.

Keywords: *Tolo's Role, Formation of GMIH*

Pendahuluan

Kata Gereja berasal dari kata Portugis *Igreya*, sedangkan dalam bahasa Yunani *Kyriake* yang berarti milik Tuhan. Kata *Kyriake* sebagai sebutan bagi persekutuan yang menjadi milik Tuhan (HarunHadiwijono.,2007)

Weinata Sairin dalam dalam buku *Teologi Perjumpaan*, memberikan sebuah rumusan mengenai gereja, yakni gereja bukan dari dunia ini, namun ia diutus ke dalam dunia. Pengkalimatan yang mengungkap identitas gereja ini, menjelaskan bahwa gereja bukanlah suatu lembaga yang berasal dari dunia ini, seperti lembaga-lembaga lainnya. Gereja dimengerti sebagai persekutuan yang didirikan oleh Allah sendiri, namun serentak dengan itu gereja diutus untuk berkarya ditengah dunia ini, untuk mendemonstrasikan shalom, atau damai sejahtera Allah (Jakarta:BPK Gunung Mulia).

Pada tahun 1940 diadakanlah Konferensi di Kupa-Kupa , Tobelo yang sudah ada tanda-tanda bahwa Zending hendak menyerahkan usaha penginjilan untuk diteruskan pribumi karena Jepang hamper menguasai ASEAN. Halmahera dikuasai

Jepang pada Mei 1942 dan Belanda di Kuasai oleh Jerman pada 10 Mei 1940. Pada Konferensi ini diputuskan pengumpulan dana setempat guna menutupi deficit anggaran Zending yang disebabkan oleh pemutusan komunikasi dengan Belanda. Hasil Konferensi antara lain membentuk Founds Injil dan hasil dana dpergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup para penginjil setempat serta cita-cita pengelolaan gereja Halmahera oleh pribumi. Kemudian mulai Jepang menghilangkan segala sesuatu yang berbau kebelaan di Indonesia.Imbasnya, banyak Zending bahkan guru jemaatpun ditawan oleh Jepang.

Beberapa pribumi menemui Mentsjibu Jepang yang mirip Resimen Kolonial Belanda di Ternate yang di fasilitasi oleh Sultan Ternate, Iskandar Mohammed Djabir Sjah guna membicarakan kepentingan gereja Halmahera. Jepang kemudian menyuruh membentuk sebuah badan persiapan kemandirian gereja yang keanggotaannya berdasarkan persetujuan Jepang.

Tak lama, berdirilah Gereja Protestan Halmahera (GPH) walaupun unsurnya lebih banyak melibatkan daerah Halamhera Barat. Sementara di Tobelo dan Galela pada Mei 1942 telah mengadakan pertemuan di Pitu guna mengantisipasi perginya Zending.Inti hasil pertemuan yang adalah keinginan mandiri akhirnya disampaikan oleh delegasi Tobelo dan Galela ke Sultan Ternate dan Mentsjibu.Mereka meminta agar Pdt. Kriekhoff yang adala pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) di Ternate melayani sakramen di Halmahera khususnya Tobelo dan Galela.Permintaan ini disetujui.

Usaha kemandirian gereja mengalami banyak tantangan diantaranya: Perang Dunia ke-II ketika sekutu berhasil mematahkan kekuatan Jepang saat sekutu menjadikan Morotai sebagai basis kekuatan di Asia. Runtuhnya Jepang di Halmahera juga menjadikan gereja di Halmahera kembali dilayani oleh para Zending (James Haire).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Strukturisme.Pendekatan Strukturisme dalam penelitian sejarah merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan peristiwa (*event*) dengan pendekatan structural, karena eksplanasi (penjelasan) sejarah dari aspek peristiwa tidak bermakna tanpa ditampilkan struktur-struktur dan determinan-determinan lainnya yang terkandung didalamnya (Lloyd, 1993; Leirissa., 1997).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk bahwa “metode penelitian sejarah adalah mengumpulkan, menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman, peninggalan-peninggalan masa lampau serta usaha untuk melakukan sintesa dari data-data masa lampau tersebut menjadi kajian yang dapat dipercaya” (Louis, 1983).

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan meneliti buku-buku sejarah, penelitian-penelitian sebelumnya, artikel, dokumentasi-dokumentasi dan ensiklopedia serta sumber-sumber lain yang dapat membantu penulisan penelitian.

Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan perancangan sistematis semua data yang terkumpul agar peneliti mengetahui makna yang telah ditemukan dan disajikan kepada orang secara bebas. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Sartono Kartohadirjo, analisis kualitatif artinya data-data yang terkumpul selanjutnya diintegrasikan atau ditafsirkan kemudian dianalisis secara kualitatif (Kartodijo, Sartono, 1982).

Hasil dan Pembahasan

Kehidupan gereja sebelum Tolo Masa Konsolidasi

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang dibentuk pada tahun 1602, selain mempunyai fungsi utama sebagai badan dagang, ternyata juga melaksanakan fungsi politik dan pemeliharaan terhadap agama Kristen. Dimasa kekuasaan badan dagang ini (abad ke-17 dan ke-18) ternyata telah berkembang suatu corak kekristenan yang di dalam Gereja Protestan di Maluku. Perkembangan demikian nampaknya tidak dapat dilepaskan dari riil kondisi gereja pada masa itu. Kehadiran para pendeta dan *Ziekentrooster* bukan saja dimanfaatkan oleh gereja untuk melayani pegawai VOC tetapi juga untuk memelihara orang-orang Kristen Ambon yang sebelumnya menganut Agama Katholik Roma yang kemudian di Protestankan ketika penguasa VOC mengambil alih kekuasaan di Ambon dari tangan Portugis pada tahun 1605.

Kekristenan yang dikembangkan oleh gereja ternyata bukan saja terdapat di "pusat" (produksi rempah-rempah) tetapi juga di daerah "pinggiran" (yang kurang strategis dari segi kepentingan dagang). Jemaat Banda, misalnya, dijadikan basis untuk pekabaran injil ke pulau Kei, kemudian Aru, Tanimbar, dan pulau-pulau Selatan Daya (Babar, Wetar, Leti dan seterusnya) dengan memakai tenaga guru. Sampai dengan abad ke-18 kekristenan telah diterima oleh orang-orang Maluku yang terhimpun dalam jemaat-jemaat dan tersebar hampir seluruh daerah kepulauan Maluku. Jumlah mereka telah mencapai puluhan ribu orang. Di Ambon misalnya, tercatat 27.311 anggota yang telah dibaptis dan di Banda 1088 orang.

Kondisi riil gereja pada masa VOC ditandai antara lain oleh metode penginjilan dan pembinaan terhadap jemaat yang dipergunakan oleh *Zienkentrooster* yakni metode "(menghafal pokok-pokok ajaran Kristen penting: Doa Bapa Kami, Pengakuan Iman Rasuli, dan Dasah Titah). Juga dalam pembinaan anggota jemaat diharapkan agar pola yang dipergunakan adalah sama yang dipakai oleh gereja induk di Belanda. Kalau penguasaan agama Kristen hanya sampai ditingkat pengetahuan saja yakni menghafal dan memelihara bentuk-bentuk yang sama sekali asing bagi mereka, maka sudah dapat diduga bahwa isi ajaran Kristen yang tidak dihayati sepenuhnya dan dengan demikian tidak berfungsi membarui hidup mereka.

Realitas lainnya yang nampak ialah sikap negative yang diperlihatkan oleh orang-orang Belanda terhadap agama (adat/kebudayaan) asli setempat. Agama ini dianggap sebagai agama Setan. Sejalan dengan itu mereka (termasuk sebagian besar para pendeta) bukannya mempelajari sungguh-sungguh, melainkan sebaliknya berusaha menghancurkan agama dan kebudayaan adat asli. Namun suatu kekeliruan yang dilakukan tanpa disadari yaitu mereka merasa puas apabila tempat-tempat dan symbol-simbol agama asli sudah dirusakan. Akan tetapi isi kepercayaan agama asli sama sekali tak tersentuh oleh usaha demikian. Unsur-unsur ini tetap hidup dan berpengaruh dalam kehidupan orang-orang Kristen di Maluku.

Perhatian yang diberikan kepada jemaat di Maluku yang berada dalam kondisi demikian merosot itu dinampakan bukan saja oleh Pemerintah Belanda, Raja Wilem I, tetapi juga oleh Badan *Zending Nederlands Zendelingnootzchap* (NZG). Sebagaimana diketahui, pada akhir abad ke-18 terjadi perkembangan baru di dalam gereja-gereja Barat yakni timbul minat yang sangat kuat untuk menyebarkan iman kristiani (pekabaran injil) ke seluruh dunia. Perkembangan yang sama terjadi pula dikalangan warga gereja di Belanda.

Pembenahan Awal oleh GPI dan NZG

Sebagai seorang yang mempunyai latar belakang gereja Gereformeerd (gereja rakyat), Joseph Kam melihat bahwa hanya melalui pembenahan dibidang organisasi yang baik, akan mudah tercipta suatu gereja yang berdisiplin, tertata dengan baik dan

mempunyai struktur. Pembinaan terhadap organisasi gereja dilakukan mulai dari jemaat di kota Ambon dan selanjutnya ke jemaat-jemaat di pulau-pulau terpencil.

Dan juga pembinaan yang dilakukan bukan saja menyangkut organisasi gereja, tetapi juga organisasi dibidang pendidikan (sekolah). Dibidang organisasi gereja, selain mengaktifkan kembali badan-badan majelis jemaat di jemaat-jemaat tertentu (Ambon, Haruku dan Saparua), juga dianjurkan agar guru-guru jemaat setempat dikunjungi mencatat secara teratur nama anak-anak yang dibaptis dan pasangan-pasangan yang akan menikah.

Dibidang pendidikan, diadakan penataan administrasi pendidikan (sekolah). Dalam rangka pembinaan dibidang organisasi ini dilakukan kunjungan secara berkala dan teratur setiap tahun ke jemaat-jemaat, baik yang dekat maupun yang jauh dari kota Ambon. Pola kunjungan itu berlaku sejak abad ke-17. Kam hanya meneruskan tradisi para pendeta VOC.

Peran Tolo Dalam Pembentukan Gmih: Kehidupan Masyarakat Halmahera Sebelum Berdirinya GMIH Zaman Portugis

Kedatangan Portugis ke Maluku merupakan bagian dari ekspansi kolonial bangsa-bangsa Eropa. Pada tahun 1498 Armada Laut Portugis di bawah pimpinan Vasco da Gama tiba di Calicut, India, yang menandai penemuan jalan laut dari Eropa ke Asia. Dengan penemuan itu mulailah era yang disebut "era Vasco da Gama", era dominasi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa atas bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yang baru berakhir pada pertengahan abad ke-20. Selanjutnya, Armada Portugis yang juga membawa para imam Katolik, menaklukkan Malaka pada tahun 1512. Pada tahun 1512 seorang Kapten Portugis sudah tiba di Ternate, di mana 10 tahun kemudian mendirikan bentengnya. Wilayah ini menjadi pusat jala, pempunan ikan, karena merupakan penghasil rempah-rempah, cengkeh dan pala yang menjadi komoditas dagang dunia yang diperebutkan bangsa-bangsa.

Selain baptisan pertama yang dilakukan untuk dua orang kepala suku Halmahera, Kolano Mamuya yang diberi nama Portugis Dom Joao de Mamuya dan Dom Tristato de Aatide untuk rekannya

Sengaji Tolo, Maluku utara juga tempat martir Kristen pertama di Indonesia. Pada tahun 1536 Simon Vas (Simeo Vas), seorang imam Fransiskan, terbunuh sebagai martir pertama di Indonesia. Sekitar tahun 1540 para Imam Yesuit tiba untuk melanjutkan penginjilan yang cukup berhasil di daerah Morotai dan Tobelo.

Zaman Zending

Permusuhan terhadap kekristenan itu merupakan faktor yang menentukan sikap pemerintah Kolonial Belanda membatasi kegiatan-kegiatan zending, setelah mengambil kembali kekuasaan monopoli perdagangan di Maluku. Permusuhan itu pula yang mendorong Pemerintah Belanda memindahkan pusat kekuasaannya di Maluku dari Ternate ke Ambon.

Perpindahan itu secara ekonomi merugikan masyarakat Maluku Utara, karena jalur Perdagangan Internasional dipindahkan. Apalagi dengan kesepakatan dengan sultan, pihak Belanda memusnahkan kebun rempah-rempah di Maluku Utara. Dengan demikian posisi Maluku Utara di gusur dari pusat niaga ke pinggiran. Kemungkinan perpindahan masuk Kristen dicegah melalui perjanjian dengan Sultan Ternate, yakni untuk menyerahkan kembali warganya yang masuk Kristen.

Agama Suku

Masyarakat Halmahera menganut Agama Suku beragama di kalangan suku-suku yang berbeda. Namun mempunyai suatu struktur dan sifat dasar yang sama, yakni penyembahan dewa-dewa dan roh-roh (termasuk roh nenek moyang) dengan kekuatan yang menentukan kehidupan manusia. Juga lazim adanya pengaruh benda-benda kerama, seperti jimat dan symbol-symbol yang lazim dalam agama-agama suku. Perjumpaan rohani dengan Islam mengarah pada berkembangnya keilahian yang tunggal dan tertinggi, sebagaimana konsep tauhid Islam. Roh-roh lainnya menjadi makhluk halus, jin, setan dan sebangsanya.

Agama Islam

Agama Islam adalah faktor penting dalam pekerjaan Zending di Indonesia, juga di Halmahera. Dalam sejarah Zending di Halmahera mula-mula dijalankan kebijakan

penginjilan yang sama terhadap penganut agama suku dan penganut agama Islam. Hal itu menimbulkan ketegangan dengan pimpinan-pimpinan Islam, termasuk pihak kesultanan. Pendekatan ini kemudian diubah sejak abad ke-20 karena pengaruh pandangan teologi misi dan kebijakan Pemerintah Kolonial.

Kebijakan Pemerintah Kolonial dibawah Snouck Hurgronje sejak akhir abad ke-19 adalah untuk mendukung Islam sebagai agama, namun menumpas aspek-aspek politiknya. Dengan demikian kekuatan-kekuatan sosial-politik Islam, termasuk kekuatan-kekuatan kesultanan-kesultanan Islam diperlemah. Tetapi dilain pihak tetap berlaku larangan pemerintah Kolonial untuk menginjili dikalangan masyarakat yang sudah memeluk Islam. Dari segi pandangan teologi misi, perubahan terjadi dalam pendekatan terhadap agama Islam.

Pembentukan GMIH

Sebagaimana kebanyakan gereja-gereja di Indonesia, pengorganisasian jemaat-jemaat hasil pekerjaan zending menjadi gereja yang berdiri sendiri di dorong oleh kenyataan pendudukan Jepang (1942-1945) yang menangkap dan memenjarakan para zending Belanda dan sejumlah personilnya. Guru-guru sekolah pribumi dan para penatua serta pemimpin jemaat lainnya mengambil alih kepemimpinan gereja dan mengupayakan pembentukan gereja. Pendudukan Jepang di Halmahera dijadikan basis pertahanan Jepang melawan sekutu, sehingga banyak instalasi dan personil militer Jepang di wilayah itu. Serangan sekutu menelan banyak korban, sebagaimana kekejaman tentara Jepang.

Perang Dunia II mengakibatkan terputusnya komunikasi dan bantuan keuangan zending. Untuk mengatasi itu pada tahun 1940 diselenggarakan suatu rapat zending di Tobelo dimana diupayakan pengembangan dana setempat untuk membiayai kebutuhan zending. Juga mulai dipikirkan menyerahkan tanggung jawab kepada guru-guru pribumi. Rapat zending ini dianggap Proto-Sinode I dalam sejarah GMIH. Pada awal zaman Jepang, gerakan-gerakan pembentukan gereja di Halmahera dimotori pada pimpinan pribumi dari wilayah Jailolo yang kemudian meluas ke Halmahera bagian Barat dan Utara (wilayah Sahu, Ibu

dan Kao), di pelopori oleh seorang pejabat pemerintah S. B. Tolo.

S. B. Tolo atau sering dikenal dengan nama Tolo adalah seorang anggota dari kelompok suku Sahu (Wayoli) sekaligus pemimpin jemaat, adalah orang pertama yang mengusulkan gerakan kemandirian gereja yang dimulai di Jailolo, Ibu dan Kao. Tolo dilahirkan di Sidangoli, Jailolo Selatan pada Juli 1904. Ia dibesarkan dan di didik oleh M. P. Pattiasina yang adalah seorang guru sekolah dan guru jemaat asal Ambon yang melayani di Sidangoli. Pada usia 17 tahun (1922) ia mulai bekerja di kantor Controleur di Jailolo. Karena kegigihan dan kesetiiaannya dalam pekerjaannya, ia dinaikan jabatannya sebagai Administrasi Distrik di Makian pada tahun 1935; untuk Ibu, (daerah Utara dekat Jailolo dan Sahu) pada September 1936; dan untuk Ibu dan Sahu pada Oktober 1941.

Menurut laporannya (Tolo) dalam sebuah dokumen antara tahun 1967-1969, Jepang baru berkuasa penuh atas Jailolo pada Mei 1942. Pada bulan itu, ia mengisahkannya dalam catatan-catatan tambahan otobiografinya: *saya ditugaskan untuk menyambut Dai Nippon di jempatan Laut Jailolo, akhirnya berurusan atas segala sesuatu yang menjadi keperluan mereka hingga akhir bulan Juni 1942 baru saya kembali ke Ibu*. Alasan inilah yang menjadi motivasi baginya untuk melakukan gerakan kemandirian gereja. Karena salah seorang pemimpin gerakan nasionalis Indonesia Soetan Sjahrir, pernah berkata bahwa masa pendudukan Jepang adalah masa "segala sesuatu baik secara rohani maupun secara materi diguncangkan dari ikatan-ikatannya yang lama".

Dari inilah muncul dua reaksi: Pertama, ada perasaan yang dikembangkan pihak Jepang, bahwa Jepang adalah pemimpin dan pelindung anti-kolonial bagi Asia. Pada tahun 1942 Jepang melancarkan apa yang disebut "Gerakan Tiga A", yang mengagungkan Jepang, sebagai pemimpin Asia; Jepang, sebagai pelindung Asia; Jepang, Cahaya Asia. Hal inilah yang membuat semua hubungan antara orang-orang Kristen Halmahera dan Zending Belanda harus diputuskan. Kedua, ada perasaan di antara orang-orang Indonesia, bahwa apabila orang-orang Jepang kelihatannya tidak beradab ini sanggup menggantikan kekuasaan colonial,

maka kekuasaan colonial tentunya sama sekali tidaklah perlu.

Jadi, ia (Tolo) pergi menghadap Sultan Ternate, Iskandar Mohammed Djabir Sjah, untuk meminta agar sultan memperkenalkannya kepada Administratur Senior Jepang di Ternate, yang disebut *Mentsjibu*. Di mata orang-orang Halmahera, status *Mentsjibu* ini sama dengan Residen Kolonial Belanda sebelumnya.

Sultan memperkenalkannya kepada mereka, yang kemudian menyuruhnya (kepada Tolo) membentuk sebuah badan persiapan untuk bakal gereja yang akan dibentuk itu dan mengajukan anggota-anggotanya kepada penguasa Jepang di Ternate.

Dengan cara ini adanya kemungkinann bahwa mereka mendapatkan izin untuk membentuk sebuah gereja yang mandiri dan dengan demikian pula mendapatkan izin untuk melaksanakan kehidupan dan pekerjaan Kristen mereka. Berdasarkan hal ini Tolo kembali dari Ternate ke Jailolo dan mencari tua-tua suku dan tidak melibatkan guru-guru sekolah dan guru jemaat senior pada tahap ini. Ia menemukan tiga tua-tua suku untuk membentuk Badan Persiapan ini bersamanya:

1. Guae Karetji, yang mewakili jemaat-jemaat di Distrik Jailolo;
2. Koroni Folori, yang mewakili jemaat-jemaat di Distrik Sahu;
3. Corneles Tolo, yang mewakili jemaat di Distrik Ibu.

Ketiga orang ini ditunjuk sebagai Badan Pengurus Jemaat-jemaat di Halmahera Barat, dengan maksud menjadi Badan Sentral untuk mengorganisasikan gereja dengan nama "Gereja Protestan Halmahera (GPH). Nama ini samabentuknya dengan nama GPM di Ambon.

Untuk menyebarkan gagasan-gagasan tentang gereja yang mandiri ini, diadakanlah pertemuan-pertemuan, pertama di Akelamo untuk wilayah Jailolo dan Sahu, kemudian di Tongutesungi untuk wilayah Ibu. Kemudian Tolo kembali ke Ternate dengan ketiga rekannya dari Badan Pengurus itu untuk memperkenalkannya kepada *Mentsjibu*. Badan Pengurus ini kemudian disahkan oleh penguasa Jepang, dan diberikan kekuasaan untuk membuka gereja-gereja di Halmahera yang telah disegel sejak pendaratan Jepang.

Ibadah-ibadah terbuka kini dapat diselenggarakan seperti biasa.

Merekapun diizinkan untuk mengembangkan GPH diseluruh pulau. Ketika kembali dari Ternate ke Jailolo pada awal tahun 1943, Tolo memulai pendekatan resmi kepada guru sekolah dan guru jemaat. Sebelumnya, ia terutama berhubungan dengan para pemimpin suku dan secara langsung dengan jemaat-jemaat.

Pertama-tama ia mengundang para guru sekolah, guru jemaat dan wakil-wakil dari jemaat-jemaat di mulai dari Pasirputih di Loloda Utara sampai ke Tongutesungi di Iboe untuk mengadakan Rapat Besar untuk menyelesaikan organisasi struktural Gereja dan untuk mengangkat pendeta-pendetanya. Meskipun menurut Jumaty keputusan – keputusan yang diambil di Rapat Besar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membentuk suatu gereja yang berdiri sendiri, lepas dari pimpinan bangsa asing. Gereja tersebut bernama GPH.
2. Menunjuk seorang guru sekolah/jemaat yang senior dan berpengalaman, yaitu Esau Nanlahij, sebagai Pendeta untuk memimpin Gereja di bidang pelayanan.
3. Menyusun sebuah Tata Gereja dan Aturan-aturan sementara, sebagai dasar untuk pekerjaan yang berlanjut.
4. Memilih dan mengangkat Dewan Pelaksana dari GPH.

Oleh karena Esau Nanlohij menolak untuk diangkat menjadi seorang pendeta dengan cara ini, Herman B. Hamijs menggantikannya dan dengan demikian diangkat sebagai satu-satunya pendeta Gereja tersebut. Hamijs adalah seorang guru sekolah/jemaat dari Pulau Sangihe Sulawesi Utara yang telah melayani selama beberapa waktu sebagai seorang pengkhotbah Zending di Halmahera; karenanya ia bukanlah berasal dari salah satu suku di Halmahera. Mengingat Rapat Besar tahun 1943, tanggung jawabnya semata-mata adalah mengorganisasikan pelayanan kependetaan. Ia bertugas menangani "badan pelayanan". Namun, diatas badan pelayanan, Badan Penyelenggara GPH.

Guae Karetji menjadi kepala organisasi dari seluruh wilayah dari Jailolo sampai Kao Timur. Sedangkan Tolo, ia bertugas pergi ke Desa Tolabit suku Modole (pedalaman Kao; dalam bahasa Belanda Boven Kao) untuk menyelenggarakan setiap

rapat dengan wakil-wakil dari jemaat Tobelo, Kao dan Modole untuk mengembangkan Gereja di wilayah tersebut. Pertemuan ini yang juga dihadiri oleh Hopaja dan P. Nanlohij dari Tobelo, menghadapisejumlah kesulitan karena Kriekhoff dari Ternate sudah tiba di Tobelo dan mempengaruhi banyak orang untuk mengusahakan agar jemaat-jemaat mereka bergabung dengan GPM. Meskipun menghadapi tekanan ini, pertemuan di Desa Tolabit sepakat untuk mendirikan GPH. Dari Tolabit Tolo turun ke pantai Kao dan kemudian ke Malifut dan akhirnya kembali ke Jailolo melalui Hutan Toloas.

Morotai, Tobelo dan dan Galela kurang terpengaruh meskipun ketika tahun 1954 saat Tolo pergi ke Morotai, ia mengembangkan gereja di pantai timur pulau tersebut dari Daeo sampai Saketa. Namun, sementara perang berkecamuk terus, komunikasi antara jemaat-jemaat tersebut menjadi semakin sulit, dan jemaat-jemaat cenderung hidup sepenuhnya secara mandiri. Banyak orang melarikan dirike hutan, dan melanjutkan kehidupan jemaat mereka dalam kondisi yang sangat primitif.

Pendudukan Jepang semakin kuat, dan sejak Oktober 1943, dan bahkan sejak Januari 1944, situasinya semakin sulit bagi penduduk ketika serangan-serangan udara Sekutu mulai dilancarkan terhadap instalasi-instalasi Jepang di Halmahera. Banyak orang yang meninggal karena kolera, dan penghuni Rumah Sakit Lepra milik Zending di Gandora dekat Tobelo diperintahkan oleh tentara Jepang untuk meninggalkannya dan pindah ke sebuah tempat perlindungan serangan udara; di sana kemudian mereka dibunuh. Gedung-gedung gereja digunakan oleh tentara Jepang sebagai gudang senjata. Pertempuran paling sengit terjadi pada September 1944 ketika pendaratan tentara Sekutu di Morotai. Menjelang akhir Perang Dunia, sejumlah besar orang Halmahera melarikan diri pada malam hari dengan menumpang perahu ke pangkalan udara Sekutu di Morotai, untuk mencari makanan, pakaian, dan obat-obatan.

Tentara Sekutu menyerbu Morotai pada 15 September 1944. Sejumlah 61.000 pasukan Amerika mendarat di pulau tersebut. Sementara pertempuran tersebut 31 tentara Amerika dan sekitar 300 tentara Jepang tewas. Antar 13-16 September, Jenderal Douglas MacArthur berada di wilayah tersebut dan

mengamati, sementara pangkalan Jepang di Teluk Galela dihantam oleh *Nashville* dan kapal-kapal lainnya dari Armada Ketujuh Amerika. Dengan kedatangan Sekutu, banyak orang Halmahera pergi ke Morotai. Pertempuran berlanjut terus hingga menyerahnya tentara Jepang tanpa syarat pada 13 Agustus 1945.

Orang-orang Kristen di Halmahera menerima berita tersebut melalui pamflet-pamflet yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat Sekutu di seluruh Halmahera. Tentara Jepang ditangkap dan dikumpulkan di Kao sebelum meninggalkan Halmahera. Penduduk mulai kembali ke desa-desa mereka dari hutan. Pemerintahan diambil alih kembali pada bulan September 1945 oleh pemerintahan sipil kolonial Belanda (NICA). Menurut Junga, seluruh penduduk menerima kembalinya Belanda dengan damai. Zending yang pertama kembali dari interniran adalah K.A. Bot, yang mula-mula mendirikan kantor di Daeo Morotai, dekat pemerintah NICA, pada Oktober 1945. Pada awal 1946, Bot dan N.W. van den Bent kembali ke Tobelo.

Sebuah konferensi lalu diselenggarakan di Tobelo. Jelas bahwa ada usaha dari para zending dan guru sekolah/jemaat orang-orang Ambon agar GPH dilupakan dan bahwa Zending berlanjut dalam cara kerjanya yang lama. Akan tetapi, kehadiran Hamijs dan Guae Karetji pada Konferensi tersebut menghalangi hal tersebut. Mereka mendesak bahwa tujuan-tujuan Gereja yang mandiri harus dipertahankan, dan bahwa sebuah Konferensi yang baru harus diselenggarakan, yang harus dihadiri juga oleh S.B. Tolo.

Hal ini diputuskan untuk diselenggarakan pada tahun 1947. Tolo menghadiri Konferensi itu di Tobelo pada 1947 dan melanjutkan perjuangan, sehingga untuk sementara waktu, nama gereja tersebut adalah GPH; dengan kata lain, para zending menerima nama ini untuk sementara waktu selagi mereka sendiri mengusahakan suatu pemecahan yang baru. Selama periode ini masih berkembang dua gagasan: pertama, bergabung dengan GPM dibawah pengaruh Zending Belanda yang tetap kuat atau; kedua, mendirikan sebuah gereja yang sama sekali mandiri di Halmahera.

Setelah Konferensi yang kemudian dan yang lebih praktis yang dihadiri oleh Tolo

pada 1947 di Tobelo, mulai diambil langkah-langkah untuk mewujudkan gagasan-gagasan untuk membentuk Gereja tersebut secara formal di Halmahera. Pada tahun yang sama, enam guru sekolah/jemaat yang lebih muda dari enam daerah kesukuan Halmahera (C. Ray-ray dari Tobelo); F. Nanere dari Kao; B. Mailoa dari Galela; D. Djumaty dari Jailolo/Sahoe; R. Salakparang dari Buli; dan H. Simange dari Loloda) diutus untuk menjalani pendidikan kependetaan di Sekolah Teologi untuk Indonesia Timur di SoE di Timor.

Dengan cara ini, orang-orang Halmahera menjamin bahwa kepemimpinan masa depan Gereja tersebut akan berada ditangan warga suku Halmahera; tidak dipengaruhi oleh orang-orang Ambon. Lalu, pada Juni 1948, diadakan Proto-Sinode kedua (di Halmahera, Konferensi 1940 dengan para zendeling dianggap sebagai Proto-Sinode pertama).

Ini adalah pertemuan yang besar, dengan wakil-wakil dari semua wilayah kepulauan tersebut. Pada saat ini, telah terbentuk sebuah sistem pemerintahan Gereja yang didasarkan pada sistem Zending pra-perang. Jemaat di organisasikan ke dalam "ring" yang masing-masing terdiri dari kurang lebih 10 orang; kemudian dua atau tiga ring membentuk sebuah klasis. Semuanya ada lima klasis, yang berada dibawah pengawasan lima pendeta yang baru ditahbiskan. Jadi, masing-masing ring terwakili pada Proto-Sinode yang kedua ini.

Jumlah besar yang hadir, kebanyakan adalah orang-orang Halmahera menjamin bahwa orang-orang Halmahera akan memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam organisasi yang mereka bentuk untuk merintis jalan bagi pembentukan Gereja.

Organisasi ini disebut "Badan Persiapan Sinode/Gereja" menurut Djumaty dan Thomas, atau "Badan Persiapan Resmi Gereja" menurut Junga. Ketuanya adalah Pdt. W. van der Hoek; Wakil Ketua Pdt. J. Djawa; dan anggota-anggota lainnya J. Junga (Sekretaris); J. Joija (Wakil Sekretaris); S.B. Lesnussa (Bendahara); S.B. Tolo, R.B. Djago, Pdt. Hamijs adalah orang-orang yang sangat mendukung pandangan di Halmahera. Jadi, bila setelah inisiatif tahun 1942 orang-orang Halmahera melihat kemunduran dari gerakan kemandirian pada tahun 1947, namun sejak

Juni 1948 mereka kembali memegang teguh kendali sampai seterusnya. Badan ini secara resmi ditunjuk oleh Proto-Sinode 1948, dan didirikan dengan upacara yang cukup meriah dengan kehadiran para pemimpin pemerintah (yang didukung Belanda) dan pemimpin Muslim.

Tugasnya adalah membuat semua persiapan untuk Sinode Pertama dari Gereja tersebut yang akan diadakan setahun kemudian, pada Juni 1949, ketika Gereja akan secara resmi menjadi independen, dan khususnya untuk merumuskan Anggaran Dasar dan Peraturan Am dari Gereja tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan.

Pada masa antara Juni 1948 dan Juni 1949, Badan Persiapan Sinode/Gereja itu harus menghasilkan Anggaran Dasar dan tata Gereja. Mereka melakukannya, namun mereka menghasilkan dokumen yang agak tradisional. Ada sembilan pasal dalam Anggaran Dasar tersebut: 1. Gereja; 2. Jemaat; 3. Jawatan; 4. Pelayanan Al-Kalam dan Tanda-tanda Ezrar; 5. Nikah; 6. Umat Kristen di dalam Persekutuan adat dan masyarakat baru; 7. Keuangan; 8. Perhubungan dengan Gereja lain dan; 9. Permohonan Peraturan Gereja. Dua butir menonjol yang perlu dicatat di sini adalah perhatian penting yang diberikan pada masalah adat dan mencoloknya persoalan tentang pernikahan Kristen, yang sudah tentu dalam konteks ini adalah suatu pertanyaan tentang adat pula. Selain itu, dokumen ini kelihatannya agak tradisional.

Tata Gereja mengenai keanggotaan Gereja, Kebaktian, Jabatan, Pendidikan Agama, Pernikahan, Keuangan, Penatua, Ring jemaat, Klasis, Sinode, Komisi, Dewan, Penyerahan kepada Gereja yang baru dan Perubahan-perubahan Peraturan; semuanya terlihat tradisional. Dapat dilihat bahwa Gereja itu akan membentuk sebuah Hukum Gereja presbiterial-sinodal yang luas; artinya, persidangan tradisional dari Majelis Jemaat, Klasis dan Sinode diperluas dengan menambahkan Ring di antara Majelis Jemaat dan Klasis.

Jadi, Sinode pertama Gereja diadakan di Tobelo dari 4-14 Juni 1949. Sidang itu dihadiri oleh wakil-wakil dari semua bagian pulau-pulau tersebut. Pada tanggal 4 dan 5 Juni, kesembilan pasal dari Anggaran Dasar diteliti, diamendir dan akhirnya diterima.

Tampaknya tidak banyak pembahasan. Namun, sebagian besar dari tanggal 5 Juni digunakan untuk membahas nama Gereja. Nama tersebut telah disepakati pada Proto-Sinode Kedua pada Juni 1948 bahwa nama Gereja tersebut adalah Gereja Protestan Halmahera (GPH), yaitu nama yang pertama-tama diambil pada tahun 1942 di Jailolo. Tetapi sekarang, 5 Juni 1949 terjadilah apa yang disebut Mailoa dan Simange “pertukaran opikiran hebat” tentang persoalan nama Gereja tersebut. Utusan-utusan dari Jailolo menegaskan bahwa nama GPH dari tahun 1942 itu hendaknya dipertahankan. Hamijs berpendapat bahwa: *walaupun bayi yang masih dalam kandungan sudah diberi namanya, akan lain jadinya setelah bayi itu dilahirkan. Ia akan diberikan nama yang berbeda.*

Hamijs bermaksud bahwa karena Sinode ini adalah saat lahirnya secara resmi Gereja di Halmahera, demikian pula nama yang pertama kali diberikan pada 1942 dan disepakati kemudian pada 1948 hendaknya tidak diubah. Mereka yang menentang nama ini, terutama orang-orang Halmahera Timur yang dipimpin oleh orang-orang Tobelo, mengemukakan alasannya bahwa mereka tidak ingin berkembangnya kesukuan di Gereja Halmahera.

GPH adalah nama yang khususnya dihubungkan dengan gerakan Jailolo/Sahoe, yang kini dianggap menyebar diseluruh kepulauan. Karena itu, pada kesempatan ini diambil pula sebuah nama lain. Nama yang diusulkan adalah “Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH). Mereka yang setuju dengan nama ini mengatakan bahwa nama ini (GMIH) semua kesukuan ditinggalkan. Kata “di” yang kecil bagi mereka adalah penting. Kata ini berarti bahwa Gereja di Halmahera hendaknya menjadi bagian dari cabang Hervormd dari kekristenan dunia kapanpun juga di Halmahera; dengan demikian, terhindarlah masalah kesukuan.

Di sini van der Hoek menyarankan agar masalah tersebut diadakan pemungutan suara, dan dengan 40 banding 7 nama “Gereja Masehi Injili di Halmahera” diterima. Nama ini pada umumnya diterima oleh mereka yang hadir, meskipun jelas bahwa orang-orang Tobelo dan Galela, dengan sejumlah dukungan dari orang-orang Ambon, telah menang terhadap kelompok Jailolo/Sahoe.

Namun demikian, Tolo dan Hamijs merasa cukup puas; Tolo menjelaskan kepada Sinode bahwa, sementara Gereja di Halmahera telah dinamakan GPH pada waktu kelahirannya pada tahun 1942, kini ia mendapatkan nama GMIH sebagai nama baptisnya pada waktu baptisannya sekarang di tahun 1949.

Begitu masalah nama ini diselesaikan pada 5 Juni 1949, semua formalitas tentang kemandirian itu berlangsung dalam cara yang normal. Pada hari berikutnya, 6 Juni 1949, upacara berlangsung dan bersamaan dengan itu secara resmi GMIH didirikan. Ketua Sinodenya yang pertama adalah Pdt. A. Ploeger dari VNZ. Keenam anggota lainnya dari Badan Pengurus ini terdiri dari tiga orang Halmahera (J. Junga, Sekretaris; Pdt. J. Djawa; dan R.B. Djago) dan tiga orang Ambon (Pdt. E. Polnaja, Wakil Ketua; S.B. Lesnussa, Bendahara; dan J. Noiija). Karena ketiga orang Halmahera tersebut adalah orang-orang Tobelo, nampaknya Tolo dan Hamijs menuntut agar Ketuanya adalah seorang zendeling (yang netral); sebab, Ploeger segera akan digantikan oleh orang Indonesia.

Karena pada kenyataannya Lesnussa dan Noiija tidak memperlihatkan pengaruh yang cukup besar, namun karena Ploeger pada umumnya adalah menjabat sementara, maka orang-orang Halmahera memegang kendali yang kuat; dukungan bagi mereka berdua dari guru sekolah/jemaat Halmahera di wilayah-wilayah menjamin hal ini. Kebaktian peresmian dipimpin oleh Djawa, dihadapan sekitar 1.400 orang, termasuk para administratur Belanda setempat dari Negara Indonesia dan banyak juga orang Muslim; para pengunjung dari bagian-bagian lain Indonesia dan Belanda juga hadir. Kemudian Hamijs memimpin perayaan Perjamuan Kudus (James Haire., Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998).

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat di simpulkan Kekristenan di Halmahera menjadi sebuah pertarungan kekuasaan oleh para misionaris Roma Ktolik dengan para Sultan Ternate untuk memperebutkan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dihasilkan diwilayah itu. Di masa itu, anutan agama

menunjukkan pemihakan kekuasaan. Bagi masyarakat Halmahera, orang-orang portugis telah datang dengan salib di satu tangan dan pedang ditangan lainnya. Tetapi ketika keuntungan mereka terancam, mereka mebuat salib itu dan menggunakan pedang saja. mereka menggabungkan kepentingan ekonomi, kekuasaan dan penyebaran agama (Gold,Glory dan Gospel).

Usaha kemandirian ini mengalami banyak tantangan di antaranya Perang Dunia II ketika sekutu berhasil mematahkan kekuatan Jepang saat sekutu menjadikan Morotai sebagai basis kekuatan di Asia. Walau demikian runtuhnya Jepang juga menjadikan gereja di Halmahera kembali dilayani oleh para Zending. Akhirnya dengan fasilitas dan pengalaman zending diadakanlah pertemuan demi terciptanya gereja Halmahera yang mandiri dengan berdirinya Gereja Masehi Injili di Halmahera pada 6 Juni 1949.

DAFTAR PUSTAKA

-, (1993). *The Structuris Of History*. Basil Black Well. London.
-, (1999). *Ragi Carita 2, Sejarah Gereja di Indonesia Th. 1960-An-Sekarang*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Badan Litabang PGI, *Teologi Perjumpaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 96
- C.W.Th. Boetzealer. (1947), *De Protestantche Kerk In Nederlandsch-Indie Haar Ontwikelling Van 1620-1939*, S-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- Demography Of Indonesia's Ethnicity*. (2015). Institute Of Southeast Asian Studies..
- Gottsschalk, Lousi. (1983), "*Mengerti Sejarah*", Jakarta: Universitas Indonesia Press, HI 32
- Hadiwijono Harun. (2007). *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia)
- Haire, James. (1998). *Sifat Dan Pergumulan Gereja Halmahera 1941-1979*. Jakarta: BPK Gunung Mulia,
- I. H. Enklaar. (1999). *Joseph Kam-Rasul Maluku*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Iwan Stephane Akardy, *Sumber Pembiayaan Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), 97.
- Kartodirjo, Sartono. (1982), "Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia". Jakarta: Gramedia, HI 58.
- Laporan Umum Sinode GPM 1957/1960, (1960).BPH Sinode GPM,*
- Leirrisa. (1997), "*Strukturisme Dalam Ilmu Sejarah (Pengantar)*", Depok: PS Ilmu Sejarah, Pps Fakultas Sastra UI.
- Lloyd, Chistoper. (1988), *Explanation In Social History*. Basil Black Well. London.
- R. Latuconsina. (1999). *Sejarah Kebudayaan Maluku*.Z. Leirrisa; G.A. Ohorella; Djuariah
- S. Marantika, Tt, Bersama GPM *Melintasi Masa Penduudkan Jepanf Di Maluku 1942-1945*, Tt.
- Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Jilid I-3b*. (1974).Ende Flores, Percetakan Arnoldus,
- Th. Van Den End, Ragi Carita 1. (1999). *Sejarah Gereja Di Indonesia th. 1500-1860*, Jakarta: BPK Gunung Mulia,
- Tilly Charles. (1981), *As Sociolgie Meets History. Studies In Social Discontinuity*. Orlando, San Diegon San Fransisco New York. London. Academic Press, Inc.